

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

A. Penelitian Tahap I (Survei Pendahuluan)

1.1. Profil Petani Budidaya Ikan

Eksistensi petani peserta BLM disamping berperan sebagai subjek penggerak usaha budidaya, sekaligus menjadi salah satu faktor produksi yaitu sebagai tenaga kerja keluarga trampil dan produktif. Petani mempunyai pengalaman, wawasan pengetahuan, dan dapat memahami/menerima inovasi dan teknologi dalam tata kelola usaha budidaya ikan.

B. Penelitian Tahap II:

2.1. Aspek Teknis

Penerapan teknis budidaya dalam tata kelola budidaya ikan akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM, secara kumulatif mengalami peningkatan/ perobahan ranking/kategori secara positif, yaitu berada pada tingkat/kategori Sedang/(Baik/Sesuai) menjadi tingkat/kategori Tinggi/(Sangat Baik/Sangat Sesuai). Dan mampu menghasilkan produksi ikan, dengan peningkatan produksi secara positif, yaitu berada pada rata-rata 363 kg (72,50%) (dari produksi rata-rata 138 kg meningkat rata-rata 501 kg) dengan tingkat kemampuan menghasilkan produksi berada pada 368% (dari 1852,13% meningkat 2219,80%).

2.2. Aspek Ekonomi

Usaha budidaya petani ikan akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM mampu menghasilkan pendapatan dengan peningkatan secara positif, yaitu berada pada total Rp.532.009.754,- (80,57%) (dari pendapatan Rp. 128. 262.656,- meningkat Rp.660.272.410,-), dengan tingkat kemampuan menghasilkan pendapatan berada pada 58,36% (dari 72,02%, meningkat menjadi 130,38%). Dan efisien dalam penggunaan biaya produksi dimana *Revenue Cost Ratio* besar dari 1 ($R/C > 1$) dengan indeks investmen kriteria berada pada 0,58 (25,22%) (dari 1,72 meningkat menjadi 2,30).

2.3. Aspek Sosial

Dinamika petani dalam KUB dan antar KUB usaha budidaya ikan akibat iintervensi kebijakan politik (*policy*) BLM secara kumulatif mengalami peningkatan/perubahan ranking katagori secara positif, dengan nilai skoring meningkat rata-rata berada pada selisih rata-rata 56 skor (40,88%)(dari nilai rata-rata (81 skor meningkat menjadi rata-rata (137 skor))... Sehingga katagori dinamika petani dari CD(Cukup Dinamis) mengalami perubahan menjadi D(Dinamis)

2.4. Aspek Politik

Aspek Politik 1 (persepsi petani terhadap kebijakan BLM yang dicanangkan pemerintah), dan Aspek Politik 2 (transparansi implementasi pendistribusian BLM kepada petani) akibat intervensi kebijakan politik (*policy*) BLM, secara kumulatif mengalami peningkatan/perubahan ranking/katagori secara positif, yaitu masing-masing: berada pada tingkat/katagori Rendah/(Cukup Positiv/Cukup Menerima) menjadi tingkat/katagori Sedang/(Positiv/Menerima). Dan berada pada tingkat/ katagori Rendah/(Cukup Transparan/Cukup Sesuai) menjadi tingkat/ katagori Tinggi/(Sangat Transparan/Sangat Sesuai).

C. Penelitian Tahap III:

Implikasi kebijakan politik (*policy*) BLM terhadap petani sebagai subjek penggerak usaha budidaya dalam masing-masing: Aspek teknis menimbulkan 6(60%) implikasi efek positif, 4(40%) implikasi efek negatif. Dan 1(50%) re-komendasi kepada petani, 1(50%) rekomendasi kepada pemerintah sebagai pe-mangku kebijakan. Aspek ekonomi menimbulkan 6(60%) implikasi efek positif, 4(40%) implikasi efek negatif. Dan 1(50%) rekomendasi kepada petani, 1(50%) rekomendasi kepada pemerintah. Aspek sosial menimbulkan 8(100%) implikasi efek positif. Dan 1(25%) rekomendasi kepada petani, 3(75%) rekomendasi kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan.

II. Saran

- 1). Pemerintah perlu mengikutsertakan petani dalam berbagai program pelatihan- pelatihan dan studi, terutama program peningkatan pengetahuan dan kete-rampilan tentang

manipulasi bioteknologi perikanan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan (*growth rate*), kelangsungan hidup (*survival rate*), sistem reproduksi (*reproductio systems*) dan pengelolaan kualitas media lingkungan hidup (*water quality*) manajemen perikanan.

- 2). Pemerintah perlu kiranya melahirkan paket bantuan kepada petani ikan berupa mesin pengolah pakan ikan yang moderen.
- 3). Perlu adanya gerakan penanaman tanaman pakan ikan (jagung, kedelai, dsb) sebagai sumber bahan baku pakan pada lahan yang belum dimanfaatkan, baik lahan khusus maupun lahan disekitar pemukiman masyarakat petani ikan.
- 4). Pemerintah dan masyarakat perlu mencari akses pemasaran ikan baik regional maupun international.
- 5). Pemerintah perlu gerakan penawaran investasi riil kepada investor/pihak lain baik dalam maupun luar negeri terutama untuk mendirikan industri pengolahan pasca panen produksi ikan patin untuk komoditi ekspor
- 6). Pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) perlu kiranya meningkatkan transparansi dan pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan/ kebijakan yang telah dicanangkan.

